



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 April 2025/Khusus - Awal Menjabat)

### Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

#### I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARTO
2. Jabatan : KETUA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI DOKTOR TEKNIK KIMIA (PAW)
3. NHK : 1012472

#### II. DATA HARTA

##### A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 1.000 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 200.000.000

##### B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 280.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. MOBIL, SUZUKI XCROSSOVER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BEJ A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

##### C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

##### D. SURAT BERHARGA Rp. ---

##### E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 230.382.362

##### F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 3.010.382.362

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

3.010.382.362

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.